

BAB I

PENDAHULUAN

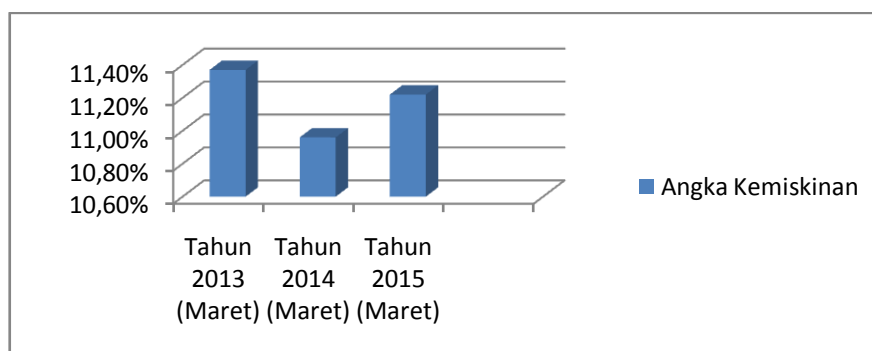
A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang menjadi isu pembangunan utama di berbagai negara didunia, terlebih lagi pada negara-negara berkembang yang sebagian masih bergelut dengan masalah kesejahteraan masyarakat. Fenomena permasalahan kemiskinan yang masih relatif tinggi pada negara berkembang dapat terlihat di Indonesia.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam dan mineral cukup melimpah masih belum menjadi jaminan dalam kesejahteraan masyarakat. Menurut data dari World Bank, Indonesia menempati urutan ke sembilan dengan angka kemiskinan tertinggi di dunia. Indonesia berada di bawah ethiopia dan india yang berada di peringkat ke 8. (Widi Agustian, 2015).

Grafik 1. 1

Persentase Angka Kemiskinan Indonesia Tahun 2013-2015



Sumber : diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS)

Dalam gambar di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 11,37% atau sekitar 20,07 Juta jiwa, kemudian pada bulan Maret 2014 menjadi 28,28 juta jiwa (10,96%) dan pada tahun 2015 mencapai 28,59 juta jiwa (11,22%). Pergerakan angka kemiskinan di Indonesia, apabila dilihat secara persentase pertumbuhan penduduk dan laju ekonomi masyarakat cenderung fluktuasi dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Namun apabila dilihat dari jumlah jiwa yang tergolong miskin yang ada, terlihat semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Kemiskinan di Indonesia tersebar di didalam berbagai daerah-daerah yang ada. Masing-masing daerah tentunya memiliki permasalahan yang berbeda yang menyebabkan semakin meningkatnya angka kemiskinan. Oleh karena itu perlu penanganan yang serius dan terintegrasi didalam memecahkan semua permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Salah satu daerah dengan angka kemiskinan yang masih tinggi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah dengan angka kemiskinan tertinggi sepulau Jawa serta angka ketimpangan Rasio Gini yang berada di bawah provinsi Papua (Nina Atmasai, 2016). Hal ini berbanding terbalik dengan tingginya tingkat pembangunan-pembangunan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbilang cukup pesat seperti pembangunan infrastruktur, Hotel dan lainnya.

Indikator kemiskinan yang berupa jumlah proporsi penduduk dalam kategori miskin multidimensi mampu untuk menunjukkan besaran persentasi

penduduk miskin. Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 mencapai 21,64% sementara pada tahun 2015 mencapai 22,15% pada tahun 2015, Dilihat rentan waktu 2013-2015 angka kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan sebesar 0,51 poin. Sementara itu angka kemiskinan secara multidimensial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 mencapai 41,37 dan meningkat sebesar 3,23 pada tahun 2015 mencapai 44,60%. (Badan Pusat statistik, 2016).

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih memiliki permasalahan kesejahteraan masyarakat. Menurut data BAPPEDA dan BPS. (2016), Kabupaten Bantul masih menjadi Kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi diantara kabupaten lain yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemiskinan di Kabupaten Bantul masih tergolong cukup tinggi meskipun terus mengalami penurunan, namun masih menjadi isu utama dalam pembangunan di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan data BPS dalam (Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, 2015), Angka kemiskinan di Kabupaten Bantul pada tahun 2015 mencapai 15,16% sedangkan pada tahun 2014 mencapai 16,97% dan tahun 2013 mencapai 17,27%. Pergerakan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bantul masih terlihat stagnan dan tidak menunjukkan pergerakan yang signifikan.

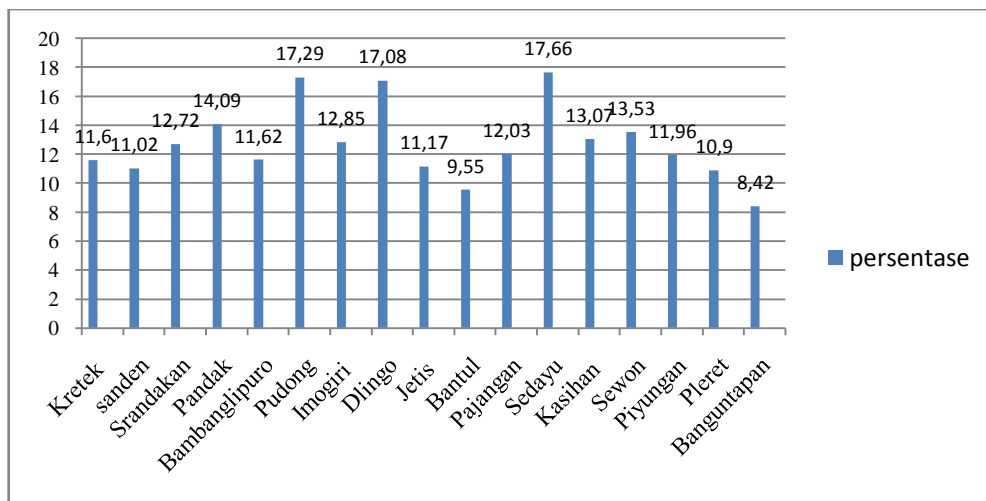
Pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2000-2015, memiliki target capaian jumlah penduduk miskin sekitar 12% akan tetapi hanya mampu terealisasi sebesar

15,16% hingga akhir tahun 2015 yang artinya masih sekitar 3,16% dari target yang telah di tentukan yang masih belum tercapai. Hal ini masih memperlihatkan bahwa permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bantul masih sangat perlu untuk ditanggulangi.

Fenomena kemiskinan dapat disebabkan oleh banyak faktor misalnya keterbatasan ekonomi, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya skill yang dimiliki sehingga tidak mampu untuk mengelola sumber daya maupun potensi-potensi yang ada. Dalam mengatasi permasalahan ini maka diperlukan peran dari pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga mamu untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan maupun papan.

Grafik 1. 2

Persentase Angka Kemiskinan Indonesia Tahun 2013-2015



Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul 2015

Persebaran penduduk miskin pada setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul dapat dikatakan merata di setiap kecamatannya. Setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul masih berhadapan dengan tingginya

angka kemiskinan, khususnya Kecamatan Sedayu, Pundong, Dlingo, Pandak, Sewon dan Kasihan. Keenam Kecamatan ini menjadi Kecamatan dengan persentase kemiskinan tertinggi di Kabupaten Bantul. Persentase kemiskinan tertinggi terdapat pada Kecamatan Sedayu dengan angka kemiskinan sebesar 17,66% dan di ikuti oleh kecamatan Pudong sebesar 17,29% serta Kecamatan Dlingo dengan 17,08%, Kecamatan Sewon dengan 13,53% dan Kasihan dengan 13,07%. Sementara itu kecamatan dengan Angka Kemiskinan terkecil terdapat pada Kecamatan Banguntapan sebesar 8,42% dan Kecamatan Bantul dengan 9,55% serta Kecamatan Pleret dengan 10,9%.

Berdasarkan data dari TKPK (2015) pada rentang tahun 2013-2014 terdapat 3 Kecamatan dengan angka Kemiskinan yang terus meningkat yaitu Kecamatan Pundong, Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Sewon. Kecamatan Kasihan menjadi Kecamatan dengan kenaikan angka kemiskinan tertinggi di Kabupaten Bantul. Pada tahun 2014 angka kemiskinan di Kecamatan Pundong mengalami kenaikan sebesar 0,23% menjadi 17,29. Sementara itu Kecamatan kasihan mengalami kenaikan sebesar 0,59% menjadi 13,07% dan Kecamatan Sewon mengalami kenaikan sebesar 0,23% menjadi 13,53 %.

Dalam mengatasi tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk suatu program yaitu Program Produk Andalan Setempat. Program Produk Andalan Setempat (PAS) merupakan Program yang biasa juga dikenal dengan istilah Program One Village One Product (OVOP). Program Produk Andalan Setempat (PAS) ini merupakan suatu Program pemberdayaan masyarakat kurang mampu untuk dapat meningkatkan

perekonomiannya. Program Produk Andalan Setempat (PAS)/OVOP ini merupakan program pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada setiap masing-masing wilayah.

Program Produk Andalan Setempat (PAS) ini merupakan program lintas Instansi yang di ampu oleh beberapa SKPD yang ada di Kabupaten Bantul, dalam Program Produk Andalan Setempat/ Ovop berada dibawah sebuah Tim yang disebut TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) yang menjadi leader didalam pelaksaan semua program Ovop di Kabupaten Bantul.

Program Pruduk Andalan Setempat (PAS)/OVOP Ini sudah di mulai sejak tahun 2013 hingga sampai saat ini. Program Ovop telah dilaksanakan hampir diseluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. Didalam pelaksanaan program PAS/OVOP di Kabupaten Bantul dapat dikatakan tidak sepenuhnya berjalan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Menurut keterangan ibu Eni Kriswandari (Analis Pemberdayaan Masyarakat BAPPEDA & Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul) menyatakan :

“Secara umum memang masih terdapat beberapa kendala dalam program OVOP yang belum dikatakan berjalan optimal. dikarenakan masih adanya beberapa kelompok yang memang SDM mereka belum siap untuk dikembangkan serta sangat sengitnya persaingan pasar didalam menjual hasil produk mereka dan lemahnya sinergitas dari setiap SKPD sehingga program ini belum berjalan maksimal.” (wawancara 19 Desember 2017)

Tingkat keberhasilan pelaksanaan program PAS/OVOP di Kabupaten Bantul selama ini sangat di pengaruhi oleh kualitas SDM kelompok sasaran, serta persaingan pasar dan sinergitas SKPD yang mengampu program Ovop.

Minimnya SDM kelompok sasaran, sengitnya persaingan pasar dan kurangnya sinergitas antar SKPD pengampu program yang sering kali menjadi kendala didalam pelaksanaan setiap program Ovop yang di kembangkan di Kabupaten Bantul.

Salah satu program OVOP/PAS yang dijalankan pada tahun 2015 adalah OVOP Batik Warna Alam. Program ini dijalankan di Kecamatan Kasihan. Kecamatan Kasihan merupakan salah satu dari 6 Kecamatan dengan angka kemiskinan tertinggi di Kabupaten Bantul setelah kecamatan Sedayu, Pundong, Pandak Dlingo dan Sewon. Angka kemiskinan Kecamatan Kasihan juga juga terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari TKPK,(2015) dalam rentang tahun 2013-2014 kemiskinan di kecamatan Kasihan mengalami Peningkatan sebesar 0,59%. Peningkatan angka kemiskinan di Kecamatan Kasihan ini merupakan yang terbesar diantara kecamatan lain di Kabupaten Bantul.

Dengan berbagai isu dan pembahasan mengenai tingginya angka kemiskinan serta masih terdapat beberapa permasalahan didalam pelaksanaan program OVOP di Kabupaten Bantul, maka dari itu penting untuk meneliti tentang efektivitas program Produk Andalan Setempat (PAS)/OVOP di Kabupaten Bantul tahun 2015-2017 (studi kasus : OVOP Batik Alam Kecamatan Kasihan).

Realisasi program Ovop di Kecamatan Kasihan pada tahun 2015 ada 2 program yaitu program Ovop Batik Alam dan Ovop Pembuatan Sangkar Burung. Dalam penelitian dipilih Ovop Batik Alam sebagai studi kasus karena program

Ovop Batik Alam memiliki cakupan KK miskin lebih besar dibandingkan dengan Ovop Pembuatan Sangkar Burung. Ovop Batik alam memiliki cakupan KK Miskin sebesar 20 keluarga sementara Ovop Pembuatan Sangkar Burung memiliki cakupan 18 KK miskin. Pemilihan kecamatan Kasihan sebagai lokasi penelitian dikarenakan Kecamatan Kasihan merupakan Kecamatan dengan angka kemiskinan yang masih sangat tinggi dari berbagai kecamatan lain serta memiliki angka kemiskinan yang semakin meningkat bahkan kecamatan kasihan merupakan kecamatan dengan kenaikan angka kemiskinan tertinggi di Kabupaten Bantul pada tahun 2013-2014.

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

Bagaimana Efektivitas Program Produk Andalan Setempat (PAS)/OVOP di Kabupaten Bantul 2015-2017 (studi kasus Ovop Batik Alam Kecamatan Kasihan)?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Mengetahui sejauh mana efektivitas dari program Produk Andalan Setempat (PAS)/OVOP di Kabupaten Bantul khususnya pada Ovop Batik Alam Kecamatan Kasihan

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat teoritis

- a. Dengan Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi pembahasan mengenai sejauh mana efektivitas program Produk Andalan Setempat (PAS)/OVOP di Kabupaten Bantul khususnya pada Ovop Batik Alam Kecamatan Kasihan
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pemerintahan khususnya tentang efektivitas program Produk Andalan Setempat (PAS)/OVOP di Kabupaten Bantul khususnya pada Program Ovop Batik Alam Kecamatan Kasihan.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sangat bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah didalam menjalankan program OVOP/PAS di Kabupaten Bantul khususnya dalam Program Ovop Batik Alam Kecamatan Kasihan
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sangat bermanfaat sebagai informasi bagi masyarakat terkait efektivitas program Produk Andalan Setempat (PAS)/OVOP di Kabupaten Bantul khususnya dalam Program Ovop Batik Alam Kecamatan Kasihan

E. Tinjauan Pustaka

Dari hasil telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Uung Muhammad Syakur dan Adril Hakim yang berjudul Analisis Pengembangan Usaha Produk Unggulan Daerah Studi Kasus OVOP Jambu Biji Merah (*Psidium Guajava*) Kelompok Tani Audisi Miskin Merdeka, Depok. Dari hasil penelitian ini mengemukakan bahwa konsep keberlanjutan dari program OVOP, khususnya dalam pengembangan produk buah jambu biji merah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga menjadi sebuah kelompok usaha yang mandiri, dilakukan melalui dibentuknya kelembagaan lokal berbentuk Koperasi Produksi memiliki peran dalam mewujudkan keberlangsungan program/ bisnis dan menumbuhkan kemandirian kelompok bisnis, yaitu mengelola kegiatan operasional produksi, mengelola keuangan dalam memenuhi kebutuhan konsumtif anggota kelompok, dan mengelola keuangan bisnis dengan mengakses modal ke lembaga keuangan syariah melalui pembiayaan mudharabah.
2. Kedua, penelitian yang dilakukan Kadek Rianita Indah Pratiwi, Ni Nyoman Dewi Pascarani, I Ketut Winaya dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program *One Village One Product* (OVOP) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung bahwa Hasil analisis temuan penelitian

menunjukkan bahwa Program OVOP yang dilaksanakan di Desa Pelaga dilihat dari keseluruhan aspek sudah berjalan dengan baik. Adapun kendala – kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program yaitu sulitnya merubah mindset pola bertani dari tradisional ke modern, pesimistis petani terhadap program baru dan terkait cuaca ekstrem yang mempengaruhi kualitas panen.

3. Selanjutnya Penelitian dari Meirina Triharini, Dwinita Larasati & R. Susanto yang berjudul Pendekatan *One Village One Product* (OVOP) untuk Mengembangkan Potensi Kerajinan Daerah Studi Kasus: Kerajinan Gerabah di Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta. Didalam penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat 3 prinsip yang harus di lihat didalam Pendekatan OVOP yaitu local but global, Prinsip self-reliance and creativity, Prinsip human resources development. Namun didalam hasil penelitian ini menunjukkan sebuah kesimpulan dari pelaksanaan program OVOP di Plered yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip OVOP secara keseluruhan. Hal ini karena Program OVOP di Plered juga tidak dititikberatkan kepada pengembangan kemandirian atau pemberdayaan masyarakat setempat serta belum memperlihatkan adanya pembinaan terhadap masyarakat setempat selain pengrajin/pengusaha. Selain itu, masyarakat juga tidak dilibatkan secara meluas dalam program OVOP.
4. Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Rusnandari Retno Cahyani yang berjudul Pendekatan *One Village One Product* (Ovop) Untuk

Meningkatkan Kreativitas Umkm Dan Kesejahteraan Masyarakat. Didalam penelitian ini mengungkapkan bahwa Pengembangan UMKM dengan pendekatan OVOP bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pembinaan secara terintegrasi dari para stakeholder. Diharapkan gerakan ini secara cepat menumbuh-kembangkan berbagai potensi sumberdaya dan kearifan lokal daerah menjadi produk bernilai tambah tinggi, yang mampu bersaing dan mampu memasuki pasar global. Percepatan pengembangan UMKM sangat penting untuk meningkatkan kreativitas UMKM, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha UMKM di Indonesia. Dengan adanya program pendekatan OVOP yang saling bersinergi dan kerjasama yang kuat dalam mengembangkan OVOP untuk meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia dan diharapkan mampu meningkatkan kreativitas, inovasi UMKM serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Meidi Syaflan, Ngatirah, Sunardi, dan Nadime Lasykar Muhammad ang berjudul Pengembangan Kawasan Pedesaan Melalui Introduksi Teknologi Biogas Sni 7826: 2012 Di Diy Sebagai Model Industri Kreatif Berbasis Syariah. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam pengembangan ekonomi wilayah pedesaan ini dapat dikatakan cukup berhasil karena mampu menyediakan kelimpahan energi Biogas yang kemudian dioptimalkan dalam mendukung usaha pertanian. Dalam mengembangkan Sumber

Daya Ekonomi Pedesaan harus memiliki sinergitas antara program dengan Kebijakan dan regulasi dari pemerintah sehingga tidak mematikan modal sosial yang berakar di masyarakat.

Berdasarkan dari uraian kajian tentang Pustaka terdahulu, terlihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki relevansi dengan beberapa penelitian terdahulu. Namun Penelitian yang dilakukan memiliki posisi yang berbeda dengan penelitian-penelitian diatas. Penelitian yang dilakukan dalam hal ini adalah melihat efektivitas dari pelaksanaan program One Village One Produk (OVOP) yang biasa di sebut Produk Andalan Setempat (PAS) di Kabupaten Bantul pada tahun 2015-2017 dengan studi kasus pada Program Ovop Batik Alam Kecamatan Kasihan.

F. Kerangka Teori

1. EFEKTIVITAS

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu hal yang dilakukan dengan baik dan berhasil. Dalam Kamus ilmiah populer, efektivitas didefinisikan sebagai suatu ketepatan penggunaan, menunjang tujuan atau hasil guna

Efektivitas merupakan suatu unsur utama didalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan didalam individu, kelompok, organisasi maupun program. Suatu kegiatan disebut efektif apabila kegiatan tersebut mampu mencapai tujuan ataupun sasaran yang ingin dicapai seperti yang telah di tentukan sebelumnya.

Menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas dalam Sanjaya, (2015) bahwa Efektivitas merupakan kemampuan didalam melaksanakan tugas dan fungsi dari suatu kelompok ataupun organisasi yang sejenis dengan tidak ada suatu tekanan atau ketegangan didalam pelaksanaannya. Sementara itu Menurut Gibson, J. L. Dkk (1997) efektivitas merupakan pencapaian sasaran yang telah di sepakati atas usaha bersama. tingkat pencapaian sasaran itulah yang menunjukkan suatu tingkat efektivitas dari organisasi ataupun program.

Menurut Ducker (1978:44) Efektivitas merupakan suatu perbandingan tingkatan antara keluaran secara empiris dengan keluaran yang diharapkan berdasarkan yang telah dirumuskan. Kata efektif dan efisien memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain. Efektif menitik beratkan pada pencapaian sasaran tanpa terlalu memperhatikan pengorbanan yang dikeluarkan sedangkan efisien lebih kepada pencapaian hasil yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. (Lestanata, 2016)

Menurut Handoko dalam Khadafi (2015) efektivitas merupakan suatu hubungan antara Output (keluaran) dengan tujuan, suatu program, kegiatan dan organisasi dikatakan efektif apabila kontribusi output semakin besar didalam pencapaian tujuan. Efektivitas lebih berfokus pada hasil yang didapatkan dalam memenuhi suatu tujuan.

Sedangkan Georgopolous dan Tannemaum (1985:50), Efektivitas dari suatu program ataupun misi dilihat dari sudut pandang pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi bukan hanya mempertimbangkan sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan (Sanjaya, 2015).

Dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program, dapat dilakukan dengan menerapkan konsep efektivitas, Konsep efektivitas ini merupakan suatu konsep yang dapat menjelaskan apakah

suatu program perlu untuk dilakukan suatu perbaikan secara signifikan atau tidak didalam manajemen program. Menurut Sanjaya, (2015) efektivitas merupakan pencapaian sasaran atau tujuan suatu kegiatan atau program dengan memanfaatkan segala sumber daya secara efisien yang dapat ditinjau dari sisi input, proses maupun output dari program tersebut. Sumber daya yang dimaksud diatas adalah hal ini berupa ketersediaan personil, sarana dan prasarana dalam melaksanakan program serta model dan metode yang digunakan. Suatu program ataupun kegiatan dikatakan efektif apabila program ataupun kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan suatu hasil yang baik.

b. Ukuran Efektivitas

Efektivitas dapat di ukur melalui berbagai sudut pandang, hal ini tergantung dari yang melakukan penilaiannya. Didalam pengukuran sejauhmana efektivitas dari suatu program tentunya terdapat beberapa indikator yang harus diperhatikan didalam pengukurannya.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian dalam Sanjaya, (2015) adalah sebagai berikut:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap

- 4) Perencanaan yang matang.
- 5) Penyusunan program yang tepat.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja,
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian

Menurut Richard M. Steers dalam Rahmawati, (2013) Indikator pengukuran efektivitas adalah sebagai berikut :

1) Produktivitas

Yaitu suatu tingkat kuantitas atau jumlah dari produk atau jasa yang dihasilkan

2) Efisiensi

Yaitu suatu perbandingan antara berbagai aspek yang berkaitan terhadap alokasi waktu yang digunakan didalam memproduksi barang atau jasa

3) Kepuasan Stakeholders

Artinya bahwa didalam pelaksanaan program ataupun organisasi para pelaksana kegiatan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, mampu bekerjasama dengan baik serta mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dari program atau organisasi.

Menurut Campbel dalam Mutiarin (2014) dalam melakukan Pengukuran tingkat efektivitas suatu program, kegiatan maupun organisasi terdapat beberapa indikator pengukuran diantaranya sebagai berikut :

- 1) keberhasilan program
- 2) keberhasilan sasaran
- 3) kepuasan terhadap program
- 4) tingkat input dan output
- 5) pencapaian tujuan menyeluruh

Budiani dalam Khadafi (2015) menyatakan bahwa terdapat beberapa variabel yang harus di perhatikan didalam melakukan pengukuran efektivitas, diantaranya :

- 1) Ketepatan sasaran program

Dalam hal ini dapat dilihat sejauh mana ketepatan antara sasaran yang sudah ditentukan dengan peserta yang terlibat didalam program

- 2) Sosialisasi Program

Didalam hal ini dapat dilihat sejauh mana kemampuan penyelenggara program didalam melakukan sosialisasi program mengenai pelaksanaan program sehingga program tersebut dapat

tersampaikan kepada masyarakat khususnya sasaran dari program tersebut.

3) Tujuan Program

Yaitu melihat sejauh mana tingkat hasil proses pencapaian program terhadap tujuan program

4) Pemantauan Program

Dalam hal ini, pemantauan dilakukan setelah pelaksanaan program yang bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan program tersebut.

c. Pendekatan Efektivitas

Menurut Cunningham dalam Khadafi, (2015) menyatakan bahwa pendekatan efektivitas dibagi menjadi tiga hal, yaitu sebagai berikut:

1) pendekatan sasaran

Pendekatan ini mencoba untuk mengatur sejauh mana keberhasilan suatu perusahaan didalam merealisasikan sasaran yang hendak di capainya. Didalam pendekatan sasaran ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan didalam mengukur efektivitas yaitu dimulai dengan mengidentifikasi sasaran dari organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi didalam mencapai sasaran tersebut. sasaran didalam hal ini adalah sasaran

yang realistis untuk dihasilkan dan memusatkan pada aspek output, yaitu dengan melakukan pengukuran terhadap keberhasilan program dalam mencapai tingkatan output. Pendekatan sasaran ini akan dapat direalisasikan apabila organisasi mampu untuk melakukan pendekatan terhadap warga binaan sosial untuk mengarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai.

2) pendekatan sumber

Pendekatan ini mengukur tingkat efektivitas melalui keberhasilan suatu organisasi didalam mendapatkan berbagai sumber yang dibutuhkan. Suatu organisasi harus mampu untuk memperoleh berbagai sumber yang dibutuhkan serta memelihara keadaan dan sistem agar menjadi efektif. pendekatan sumber ini dapat di ukur dengan seberapa jauh tingkat hubungan antara warga binaan sosial dengan lingkungan sekitar.

3) pendekatan proses

Pendekatan ini melihat efektivitas sebagai suatu definisi dan kondisi kesehatan dari organisasi. Dalam organisasi yang efektif, segala proses internal mampu berjalan dengan lancar dimana semua kegiatan yang ada berjalan secara terkoordinasi. pendekatan ini tidak terlalu memperhatikan

lingkungan akan tetapi lebih memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan terhadap berbagai sumber yang dimiliki oleh organisasi, yang memperlihatkan tingkat kesehatan dari organisasi. Tujuan dari pendekatan ini adalah bagaimana suatu organisasi mampu untuk menggunakan semua program maupun kegiatan secara terkoordinir dengan baik kepada warga binaan sosial.

2. KEBIJAKAN PUBLIK

a. Definisi Kebijakan Publik

Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Rosyid, Moh (2012) kebijakan publik/public policy merupakan suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu (a projected of goals, values, and practices)". Easton dalam Jatmiko, (2012) juga memberikan definisi kebijakan publik merupakan *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat yang ada.

George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Rosyid, Moh (2012) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan".

Menurut Thomas R Dye dalam Jatmiko, (2012) mendefinisikan Kebijakan Publik adalah "*is whatever government choose to do or not to*

do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini memiliki penekanan bahwa kebijakan publik merupakan sesuatu perwujudan dari “tindakan” dan bukan merupakan suatu pernyataan keinginan dari pemerintah atau pejabat publik. Disamping itu pilihan pemerintah atau pejabat publik untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan suatu kebijakan publik karena memiliki pengaruh terhadap masyarakat (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Menurut W. I. Jenkins dalam Novita, (2016) Kebijakan Publik merupakan suatu keputusan yang saling memiliki keterkaitan diambil oleh seorang ataupun sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta dengan cara-cara untuk mencapainya tujuan tersebut. Keputusan-keputusan tersebut dalam prinsipnya masih berada pada batasan-batasan tertentu sesuai dengan kewenangan dari aktor-aktor tersebut.

b. Ciri- Ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharmo dalam Jatmiko, (2012) ciri khusus dalam kebijakan publik bersumber pada suatu kenyataan bahwa kebijakan tersebut dirumuskan. Beberapa ciri kebijakan publik antara lain:

- 1) Kebijakan Publik merupakan suatu tindakan yang mengarah kepada suatu tujuan dari pada sebagai tindakan yang serba acak

dan kebetulan. Kebijakan publik yang ada didalam sistem politik merupakan suatu tindakan yang direncanakan.

- 2) Kebijakan merupakan suatu tindakan yang saling berkaitan mengarah kepada suatu tujuan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan suatu keputusan yang berdiri sendiri.
- 3) Kebijakan publik saling berkaitan dengan apa yang harus dilakukan.
- 4) Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. hal ini bergantung kepada keputusan ataupun tindakan yang di buat oleh pejabat-pejabat pemerintah.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Publik

Menurut AG Subarsono dalam Novita, (2016) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan publik, antara lain :

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan, dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama

sekali oleh kelompok sasaran, maka inilah yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran informasi tersebut

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting agar implementasi kebijakan dapat efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi sebatas dokumen saja dan sering tidak mencapai tujuan yang telah dibuat.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, contohnya komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi kebijakan.

4) Struktur organisasi

Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar operating), ini menjadi pedoman bagi setiap implementor di dalam bertindak.

3. KEMISKINAN

a. Definisi Kemiskinan

Menurut UNDP (1997), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Kemiskinan dapat dilihat dengan cara membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang per bulan (Bappeda & Bps Diy, 2016)

Menurut Wini (2010), Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana secara ekonomi masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup standar rata-rata masyarakat di daerahnya. Kondisi ini memperlihatkan rendahnya tingkat pendapatan suatu masyarakat sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya seperti sandang, pangan dan papan. Pendapatan yang rendah masyarakat juga dapat mempengaruhi didalam memperoleh akses dalam hal standar pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Menurut Awalina, (2014) Kemiskinan dalam arti luas yaitu suatu bentuk keterbatasan yang dimiliki seseorang, komunitas, keluarga, maupun negara yang memiliki pengaruh terhadap ketidaknyamanan terhadap kehidupan, sulit untuk memperoleh pemenuhan hak dan

keadilan, posisi bergaining (tawar) yang terancam hingga semakin suramnya masadepan suatu bangsa

Dalam melihat kemiskinan pada dasarnya terdapat beberapa karakteristik didalam pengelompokkannya yaitu sebagai berikut :

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Absolut merupakan kemiskinan yang dilihat berdasarkan pada tingkat pendapatan seseorang dilihat dari terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar didalam kehidupan sehari-hari (Bappeda & Bps Diy, 2016). Oleh karena itu kemiskinan Absolut dapat di ukur dengan cara membandingkan antara pendapatan seseorang dengan kebutuhan pendapatan untuk mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan Relatif merupakan kemiskinan yang diukur dengan melihat tingkat ketimpangan sosial, hal ini karena ada orang yang mampu untuk memenuhi kebutuhan minimumnya namun masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya. (Bappeda & Bps Diy, 2016)

3) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan yang disebabkan oleh sikap dari individu atau seseorang yang disebabkan oleh faktor budaya dalam diri individu tersebut. contohnya seperti malas, tidak mau berusaha

memperbaiki kehidupannya, tidak memiliki kreatifitas meskipun sudah ada dorongan dari pihak lain. (Awalina, 2014)

4) Kemiskinan struktural

Kemiskinan yang dilihat dari minimnya akses seseorang terhadap pemenuhan sumber daya yang ada, baik dalam bidang sosial budaya dan sosial politik (Awalina, 2014).

Todaro dalam (Bappeda & Bps Diy, 2016) menyatakan bahwa variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) perbedaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan, (2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara lain, (3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, (4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara, (5) perbedaan struktur industri, (6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain dan (7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik, dan kelembagaan dalam negeri.

b. Pengukuran Kemiskinan

Menurut Ikhsan dalam (Bappeda & Bpd Diy, 2016) faktor-faktor yang mempengaruhi determinasi kemiskinan dapat dibagi 4 yaitu pengaruh Sumber Daya Manusia, Modal fisik, (*physical productive capital*), status pekerjaan, dan karakteristik desa. Indikator yang sering digunakan pada Sumberdaya Manusia adalah jumlah tahun bersekolah

anggota keluarga, pendidikan kepala keluarga, dan jumlah anggota keluarga. Oleh karena itu dapat dilihat secara umum bahwa apabila semakin tinggi tingkat pendidikan anggota keluarga maka semakin berpeluang pula untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Sementara itu modal fisik dapat diukur dengan indikator luas lantai perkapita dan kepemilikan asset seperti lahan, khususnya untuk pertanian. Sedangkan status pekerjaan, di mana status pekerjaan utama kepala keluarga jelas akan memberikan dampak bagi pola pendapatan rumah tangga.

World Bank (2002) mengategorikan karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumah tangga, dan individu. Pada faktor komunitas, infrastruktur merupakan determinan utama kemiskinan. Keadaan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, selain itu memudahkan investor untuk melakukan investasi di daerah yang bersangkutan.

4. PROGRAM OVOP/PRODUK ANDALAN SETEMPAT

a. Definisi program OVOP

Menurut Shakya dalam (Syakur & Hakim, 2016) OVOP merupakan suatu konsep pengembangan potensi-potensi daerah untuk menghasilkan produk-produk yang unik dan khas dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerah tersebut. tujuan dari OVOP ini adalah untuk menggali, mengoptimalkan serta mempromosikan produk-produk inovatif, kreatif dan memiliki ciri tertentu dari suatu daerah untuk meningkatkan daya saing produk agar lebih bernilai tinggi sehingga mampu untuk meningkatkan produktifitas dan ekonomi masyarakat setempat.

OVOP berarti One village one product atau satu desa satu produk yang bersifat unggulan. Penggunaan kata satu produk ini merujuk pada pengembangan potensi daerah pada wilayah tertentu. Dalam hal ini pengertian desa dalam konsep OVOP bukan berarti fokus pengembangannya dalam tingkat desa melainkan dapat juga diartikan secara luas menjadi kecamatan atau kabupaten.

Program One Village One Product (OVOP)/PAS memiliki beberapa tujuan didalam implementasinya yaitu (1) Mengembangkan komoditas unggulan daerah yang memiliki potensi pemasaran lokal maupun internasional. (2) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta nilai tambah produk, agar mampu bersaing dengan produk dari luar negeri (Impor). (3) Khusus kegiatan OVOP yang dilakukan oleh

Kementerian Koperasi dan UKM dalam mengembangkan OVOP harus melalui Koperasi. (4) Meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

b. Prinsip-Prinsip OVOP

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia terdapat beberapa Prinsip didalam pengembangan OVOP diantaranya sebagai berikut :

1) Lokal Tapi Global

Pengembangan program OVOP memiliki tujuan untuk mengembangkan, meningkatkan dan memasarkan produk suatu daerah yang memiliki ciri tersendiri dapat menjadi suatu kebanggaan masyarakat setempat. Terlebih dapat dipasarkan baik pada pasar berskala nasional maupun internasional sehingga tercapai tujuan produk “Lokal Tapi Global”

2) Kemandirian dan Kreativitas

sebagai suatu program pemberdayaan masyarakat, sasaran utama dari program OVOP merupakan masyarakat setempat supaya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan kemandirian dan kreativitasnya.

3) Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pengembangan program OVOP juga harus didukung oleh Sumber daya manusia yang mumpuni. Oleh karena itu pemerintah daerah tentunya harus mampu untuk

mengembangkan Sumber daya manusia yang kreatif, inovatif sehingga dapat meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing produk.

G. Definisi Konseptual

1. Efektivitas merupakan suatu proses pencapaian sasaran program terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan benar (doing the right things) dengan memanfaatkan segala sumber daya seperti ketersediaan personil, sarana dan pra sarana yang dapat ditinjau dari input, proses serta output dari program tersebut.
2. Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana individu, keluarga maupun kelompok tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan standar minimumnya seperti kebutuhan sandang pangan dan papan karena memiliki keterbatasan pada pendapatan yang minim.
3. Program OVOP (One Village One Product) merupakan suatu program yang lebih berfokus untuk mengembangkan produk potensial yang dimiliki oleh masing-masing daerah dalam rangka untuk membantu masyarakat desa ataupun kecamatan untuk meningkatkan inovasi, kreatifitas dan daya saing produk-produk lokal daerah didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sehingga akan terbentuk produk-produk andalan daerah setempat.

H. Definisi Operasional

Dalam melakukan pengukuran efektivitas, peneliti menggunakan beberapa Indikator didalam melaksanakan penelitian. Indikator-indikator yang digunakan ini mengacu kepada indikator yang telah di kemukakan oleh Campbel diantaranya yaitu :

1. Keberhasilan program
 - a. Keseluruhan target dari pelaksanaan program OVOP/PAS dalam mengatasi kemiskinan dalam Program Ovop Batik Tulis Alam Kecamatan Kasihan
 - b. Target Capaian yang terlealisasi dalam Program Ovop Batik Tulis Alam Kecamatan Kasihan
 - c. Permasalahan didalam pelaksanaan Program Ovop Batik Tulis Alam Kecamatan Kasihan
2. Keberhasilan sasaran
 - a. Sasaran dari Program Ovop Batik Tulis Alam Kecamatan Kasihan
 - b. Sasaran yang terealisasi
 - c. Implikasi dari Program Ovop Batik Tulis Alam Kecamatan Kasihan
3. Kepuasan terhadap program
 - a. Tingkat Kepuasan dari pengampu dan pelaksana program atau kegiatan
 - b. Tingkat kepuasan kelompok Batik Tulis Alam
 - c. Keinginan, saran dari kelompok Batik Tulis Alam

4. Tingkat input dan output
 - a. Identifikasi Input (masukan) dan Output (keluaran) Program Ovop Batik Tulis Alam Kecamatan Kasihan
 - b. Faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh
 - a. keefektifan dan efisiensi dari Program Ovop Batik Tulis Alam Kecamatan Kasihan
 - b. Perubahan terhadap kelompok Program Ovop Batik Tulis Alam Kecamatan Kasihan
 - c. Problem dalam pelaksanaan program/kegiatan

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan model penelitian studi kasus. Menurut Bodgar dan Taylor dalam Moleong, (2001:3), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan menampilkan data dalam bentuk deskriptif atau tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif dengan mode studi kasus ini merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan dari suatu program yang sudah dibuat dan dijalankan oleh pemerintah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak dengan cara dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, dan analisis informasi.

Didalam penelitian Efektivitas program Produk Andalan Setempat (PAS) /OVOP di Kabupaten Bantul tahun 2015-2017 (studi Kasus Program Ovop Batik Alam Kecamatan Kasihan). Peneliti melihat tingkat efektivitas dari program PAS/OVOP yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) serta Dinas Perindustrian, UKM dan Koperasi

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan berlokasi pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bantul sebagai tim pemetaan dan perencana program, Dinas terkait yang memiliki hubungan dengan Program Produk Andalan Setempat (PAS) ini yang dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian, UKM dan Koperasi sebagai pelaksana program kegiatan serta Kelompok Usaha Batik Saka Wanodya sebagai sasaran program.

3. Unit Analisa

Unit analisis merupakan suatu sumber informasi mengenai variabel-variabel di dalam suatu penelitian. Pada penelitian Efektivitas program Produk Andalan Setempat (PAS) /OVOP di Kabupaten Bantul tahun 2015-2017 (studi Kasus Program Ovop Batik Alam Kecamatan Kasihan) ini peneliti menentukan unit analisis data yang mampu untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

Pada poses ini peneliti mendapatkan data dari informan kunci yang berasal dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bantul yang di wakili oleh ibu Eni Kriswandari S.E, M.Ec.Dev sebagai analis Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perindustrian, UKM dan koperasi yang di wakili oleh Eko Priyo Atmojo ST selaku staf analis bidang produk industri serta kelompok Pengerajin Batik Alam Saka Wanodya yaitu

ibu Wineng Endah Winarni dan Bapak Dedi H Purwadi selaku anggota dan pendamping kelompok.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik atau prosedur untuk memperoleh data yang diperlukan didalam penelitian yang dilakukan secara sistematis. Teknik pengumpulan data memiliki hubungan yang erat dengan masalah yang ingin di pecahkan didalam penelitian. Teknik pengumpulan data sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah penelitian, apabila didalam penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang salah maka permasalahan yang ada didalam penelitian tidak akan dapat terpecahkan.

Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Banyak masalah yang dirumuskan tidak bisa terpecahkan karena metode untuk memperoleh data yang digunakan tidak memungkinkan ataupun metode yang ada tidak dapat menghasilkan data seperti yang diinginkan menurut Nazier dalam (Nurmala, 2015). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) dengan yang di wawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. (Moleong, 2001: 135)

Didalam penelitian Efektivitas program Produk Andalan Setempat (PAS) /OVOP di Kabupaten Bantul tahun 2015-2017 dilakukan pengumpulan data melalui proses wawancara dengan Narasumber. Peneliti melakukan wawancara dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bantul yang di wakili oleh ibu Eni Kriswandari S.E, M.Ec.Dev sebagai analis Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perindustrian, UKM dan koperasi yang di wakili oleh Eko Priyo Atmojo ST selaku staf analis bidang produk industri serta kelompok Pengerajin Batik Alam Saka Wanodya yaitu ibu Wineng Endah Winarni dan Bapak Dedi H Purwadi selaku anggota dan pendamping kelompok.

b. Observasi

Observasi Menurut Hasan dalam (Abror, 2013) Observasi ialah pencatatan, pengubahan, pemilihan serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris didalam penelitian.

Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah jenis observasi langsung dan tidak langsung. Dalam hal ini peneliti melakukan

pengamatan secara tidak langsung mengenai kegiatan yang dilakukan didalam Kelompok Batik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu mencari berbagai sumber data dan informasi yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Selain melakukan wawancara dan observasi, peneliti juga mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan Program Produk Andalan Setempat (PAS) /OVOP) Kabupaten Bantul dengan mencari dokumen- dokumen terkait. Dokumen yang di analisis oleh peneliti berupa keputusan Kepala Dinas Perindakop Kabupaten Bantul No 870/2405 tentang penetapan kelompok usaha peserta OVOP 2015.

5. Jenis Data

a. Data Primer

Menurut Hasan dalam (Abror, 2013), Data Primer merupakan kumpulan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti didalam proses penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini sumber data primer yang di ambil oleh peneliti berupa Hasil Wawancara dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bantul yang di wakili oleh ibu Eni Kriswandari S.E, M.Ec.Dev sebagai analis Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perindustrian, UKM dan koperasi yang di wakili oleh Eko Priyo Atmojo ST selaku staf analis bidang

produk industri serta kelompok Pengerajin Batik Alam Saka Wanodya yaitu ibu Wineng Endah Winarni dan Bapak Dedi H Purwadi selaku anggota dan pendamping kelompok.

b. Data Sekunder

Menurut Hasan dalam (Abror, 2013) Data Sekunder merupakan sumber data yang didapatkan dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang telah ada. Peneliti mendapatkan data-data yang berhubungan dengan program Produk Andalan Setempat (PAS) /OVOP) dari dokumen instansi pemerintahan yang berkaitan dengan obyek penelitian dalam Produk Andalan Setempat (PAS) /OVOP) di Kabupaten Bantul. Dalam hal data sekunder didapka berupa hasil observasi terhadap kegiatan dalam kelompok batik serta hasil studi dokumentasi terhadap keputusan Kepala Dinas Perindakop Kabupaten Bantul No 870/2405 tentang penetapan kelompok usaha peserta OVOP 2015.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif. menurut Putra dan Hendrawan dalam (Nurmala, 2015). Analisis kualitatif merupakan analisis data dengan melakukan pemilihan dan penyeleksian data-data yang telah didapatkan sesuai dengan kebutuhan dan relevansi dari materi penelitian yang dibutuhkan kemudian disusun dengan sistematis dengan metode pemikiran yang deduktif untuk

memecahkan permasalahan yang di angkat didalam penelitian. Analisis kualitatif adalah suatu model analisis yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Data deskriptif analitis merupakan data yang dihasilkan dari narasumber berupa lisan dan tulisan. Analisis kualitatif dilakukan dengan berbagai tahap yaitu :

a. Reduksi Data

proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, abstraksi dan mentransformasikan data yang didapatkan. Reduksi data dilakukan pada hasil wawancara dengan narasumber dari TKPK, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengan dan Perindustrian, Kelompok Batik Alam juga dari hasil observasi dan Dokumentasi

b. Penyajian Data

Mendesripsikan dan mengembangka data ataupun informasi dalam mentuk tulisan yang telah dilakukan analisis. Penyajian data yang dilakukan berdasarkan reduksi data yang telah dilakukan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pembentukan kesimpulan penelitian dari hasil analisis dalam penyajian data. Pembentukan kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan verifikasi dan penarikan inti dari hasil penyajian data dan analisis